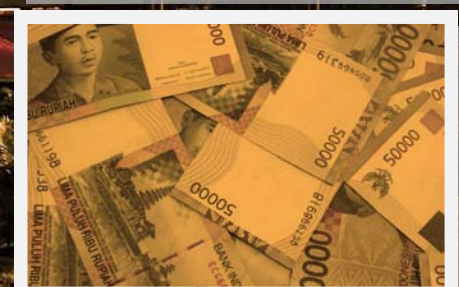
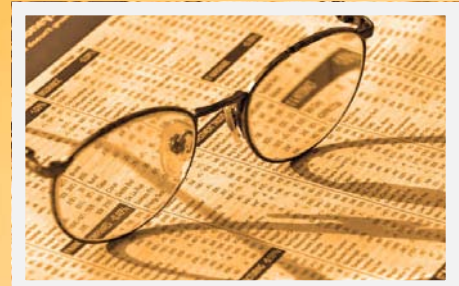




STATISTIK KEUANGAN DAERAH *REGIONAL FINANCIAL STATISTICS*

Daerah Istimewa Yogyakarta 2012 - 2013



STATISTIK KEUANGAN DAERAH
REGIONAL FINANCIAL STATISTICS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2012-2013

ISSN : 0126.4133

No. Katalog BPS/ *Catalog Number* : 7203005.34

No. Publikasi/ *Publication Number* : 34542.14.03

Jumlah Halaman / *Number of pages* : vii + 56 Halaman / *Pages*

Penyunting/ *Editor* :

1. Ir. Haryono, M.Si.
2. Santi Wijayanti, S.Si.

Naskah/ *Manuscript* :

Paulus Henri Laksono, SST

Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen

Financial and Producer Price Statistics Subdivision

Gambar Kulit/ *Cover Design*

Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen

Financial and Producer Price Statistics Subdivision

Diterbitkan oleh/ *Published by* :

BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

BPS – Statistics of D.I. Yogyakarta Province

Boleh Dikutip dengan menyebut sumbernya.

May be cited with reference to the source.

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2012-2013 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang secara teratur telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini menyajikan data mengenai Realisasi APBD 2012 dan APBD 2013 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk perbaikan publikasi di masa mendatang, tanggapan dan saran-saran dari para pemakai sangat diharapkan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Maret 2013

Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,

J. Bambang Kristianto, MA
NIP. 19561223 197803 1 001

P R E F A C E

The publication of Regional Financial Statistics Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2013 is the continuation of previous publications published by BPS–Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta. This book consists of data about The Daerah Istimewa Yogyakarta and Regency/Municipality Regional Government’s actual revenues and expenditures.

We hope that this publication gives significant contributions to the Regional Financial of Regional Government information in Daerah Istimewa Yogyakarta. Comments and suggestions to improve the contents of this publication are always be welcomed. We would like to express our sincere thanks to those who have contributed to make this publication was released.

*Yogyakarta, March 2013
BPS – Statistics of
Daerah Istimewa Yogyakarta Province
H e a d,*

*J. Bambang Kristianto, MA
NIP. 19561223 197803 1 001*

DAFTAR ISI / *List of Contents*

KATA PENGANTAR / <i>PREFACE</i>	i
DAFTAR ISI / <i>List of Contents</i>	iii
I. PENJELASAN UMUM	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Ruang Lingkup.....	1
1.3. Konsep dan Definisi	2
II. ULASAN RINGKAS	6
Tabel-Tabel / <i>Tables</i>	
1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012.....	7
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012.....	10
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013	10
4. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2012	11
5. Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.....	13
6. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012.....	14
7. Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013	15
8. Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2012	16

9.	Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012	17
10.	Jumlah dan Persentase Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013	17
11.	Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2012	18
12.	Persentase Realisasi Belanja Menurut Jenisnya di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012.....	19
13.	Persentase Rencana Belanja Menurut Jenisnya di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013.....	20
1.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013</i> (000 Rp).....	21
1.2.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Receipts, in 2012-2013</i> (000 Rp).....	22
1.3.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Expenditures, in 2012-2013</i> (000 Rp).....	23
1.4.	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013</i> (Persen/Percent).	24
1.5.	Persentase Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Receipts, in 2012-2013</i> (Persen/Percent).	25
1.6.	Persentase Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Expenditures, in 2012-2013</i> (Persen/Percent).	26

2.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Kulonprogo Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (000 Rp)</i>	27
2.2.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Kulonprogo Regency Government's Receipts, in 2012-2013 (000 Rp)</i>	28
2.3.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Kulonprogo Regency Government's Expenditures, in 2012-2013 (000 Rp)</i>	29
2.4.	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Kulonprogo Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)</i>	30
2.5.	Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Kulonprogo Regency Government's Receipts, in 2012-2013 (Persen/Percent)</i>	31
2.6.	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Kulonprogo Regency Government's Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)</i>	32
3.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Bantul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (000 Rp)</i>	33
3.2.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Bantul Regency Government's Receipts, in 2012-2013 (000 Rp)</i>	34
3.3.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Bantul Regency Government's Expenditures, in 2012-2013 (000 Rp)</i>	35
3.4.	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Bantul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)</i>	36
3.5.	Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Bantul Regency Government's Receipts, in 2012-2013 (Persen/Percent)</i>	37

3.6	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Bantul Regency Government's Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)</i>	38
4.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Gunungkidul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (000 Rp)</i>	39
4.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Gunungkidul Regency Government's Receipts, in 2012-2013 (000 Rp)</i>	40
4.3	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Gunungkidul Regency Government's Expenditures, in 2012-2013 (000 Rp)</i>	41
4.4	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Gunungkidul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)</i>	42
4.5	Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Gunungkidul Regency Government's Receipts, in 2012-2013 (Persen/Percent)</i>	43
4.6	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Gunungkidul Regency Government's Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)</i>	44
5.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Sleman Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (000 Rp)</i>	45
5.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Sleman Regency Government's Receipts, in 2012-2013 (000 Rp)</i>	46
5.3	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Sleman Regency Government's Expenditures, in 2012-2013 (000 Rp)</i>	47
5.4	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Sleman Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)</i>	48

5.5	Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Sleman Regency Government's Receipts, in 2012-2013 (Persen/Percent)</i>	49
5.6	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Sleman Regency Government's Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)</i>	50
6.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Yogyakarta City Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (000 Rp)</i>	51
6.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Yogyakarta City Government's Receipts, in 2012-2013 (000 Rp)</i>	52
6.3	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013 / <i>Realization of Yogyakarta City Government's Expenditures, in 2012-2013 (000 Rp)</i>	53
6.4	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Yogyakarta City Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)</i>	54
6.5	Persentase Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Yogyakarta City Government's Receipts, in 2012-2013 (Persen/Percent)</i>	55
6.6	Persentase Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013 / <i>Percentage of Yogyakarta City Government's Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)</i>	56

I. PENJELASAN UMUM

I.1. Pendahuluan

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk mendapatkan dan meningkatkan serta menggali sumber-sumber potensi daerah. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu data statistik mengenai keuangan daerah menjadi semakin diperlukan dalam rangka keperluan kelengkapan informasi tentang keuangan negara, analisis dan pengambilan keputusan. Kegunaan data keuangan daerah antara lain :

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi secara makro seperti pendapatan regional, tabel input output, dan neraca arus dana.
2. Memberikan informasi tentang realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi pemerintah pusat, untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah.

I.2. Ruang Lingkup

Pengumpulan data statistik keuangan daerah dibedakan antara lain :

1. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dikumpulkan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

I.3. Konsep dan Definisi

I.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.1. Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

1.2. Retribusi Daerah

Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi dalam tiga bagian yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Contoh retribusi jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Contoh retribusi jasa usaha antara lain pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi usaha daerah, dan lain-lain. Contoh retribusi perizinan tertentu antara lain izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain-lain.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan ini terdiri dari Bagi

Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1. Bagi Hasil Pajak.

Bagi hasil pajak terdiri dari bagian penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak.

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2.3. Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

2.4. Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah penerimaan dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Penerimaan lainnya terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

I.3.2 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Tak Langsung

Belanja tak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Kelompok belanja tak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja langsung meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

II. ULASAN RINGKAS ANALISIS KEUANGAN DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASAR REALISASI APBD 2012 DAN APBD 2013

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian wewenang ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memenuhi azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Wujud otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimalkan pengeluaran.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Selanjutnya, berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisisnya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Dalam Tabel 1. dapat dilihat gambaran realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja (Juta Rupiah)	Surplus/Defisit (Juta Rupiah)	Ratio Pendapatan terhadap Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	2.171.734,31	2.053.825,96	117.908,35	1,06
Kab. Kulonprogo	882.586,66	881.690,25	896,41	1,00
Kab. Bantul	1.337.570,72	1.282.878,38	54.692,34	1,04
Kab. Gunungkidul	1.076.502,00	1.073.158,31	3.343,69	1,00
Kab. Sleman	1.589.722,97	1.421.401,17	168.321,80	1,12
Kota Yogyakarta	1.158.134,80	1.023.949,92	134.184,88	1,13

Dari tabel tersebut dapat kita amati, bahwa rasio pendapatan/penerimaan daerah terhadap belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota se- Daerah Istimewa Yogyakarta lebih dari satu atau mengalami surplus anggaran. Hal ini berarti bahwa realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun 2012 sudah dapat mencukupi kebutuhan belanja daerah.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 memperoleh pendapatan/penerimaan sebesar 2,17 trilyun rupiah dengan total pembelanjaan mencapai besaran 2,05 trilyun rupiah. Dengan demikian pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami surplus keuangan sebesar 117,91 milyar rupiah.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memperoleh pendapatan/penerimaan keuangan terbesar diantara kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mencapai nilai 1,59 trilyun rupiah. Dengan belanja sebesar 1,42 trilyun rupiah membuat kabupaten ini mengalami surplus anggaran sebesar 168,32 milyar rupiah pada tahun 2012.

Realisasi pendapatan/penerimaan daerah kabupaten/kota tahun 2012 yang terendah diterima oleh Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar 882,59 milyar rupiah. Pada tahun tersebut Kabupaten Kulonprogo menggunakan anggaran sebesar 881,69 milyar sehingga mengalami surplus sebesar 896,41 juta rupiah.

Salah satu syarat yang diperlukan (*necessary condition*) untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah sebagaimana uraian sebelumnya, adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah tersebut telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu disamping sumber pembiayaan dari pemerintah di atasnya (berupa dana perimbangan) juga sumber pembiayaan dari dalam sendiri.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, seiring dengan perkembangan perekonomian dan tanpa mengurangi alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah yang dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah.

Jenis-jenis pajak yang dikelola Pemerintah Provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan jenis pajak yang dikelola pemerintah kabupaten/kota yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Sumbangan realisasi PAD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 relatif besar mencapai 46,23 persen dari total pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, sangat diharapkan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah.

Persentase PAD terhadap belanja daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk mencukupi belanja daerah sendiri. Hampir separuh atau 48,89 persen dari belanja daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 dapat dicukupi dari PAD-nya.

Sumbangan PAD masing-masing pemerintah kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap total pendapatan ataupun terhadap total belanja tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja
Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja (Juta Rupiah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)	Persentase PAD thd Pendapatan	Persentase PAD thd Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	2.171.734,31	2.053.825,96	1.004.063,13	46,23	48,89
Kab. Kulonprogo	882.586,66	881.690,25	74.028,66	8,39	8,40
Kab. Bantul	1.337.570,72	1.282.878,38	166.597,78	12,46	12,99
Kab. Gunungkidul	1.076.502,00	1.073.158,31	67.050,78	6,23	6,25
Kab. Sleman	1.589.722,97	1.421.401,17	301.069,54	18,94	21,18
Kota Yogyakarta	1.158.134,80	1.023.949,92	338.839,61	29,26	33,09

Besaran sumbangan PAD terhadap pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 terlihat masih kecil. Dari lima kabupaten/ kota di D.I. Yogyakarta, hanya ada tiga kabupaten/kota yang sumbangan PAD-nya di atas 10 persen, yakni Kota Yogyakarta dengan sumbangan PAD sebesar 29,26 persen, Kabupaten Sleman sebesar 18,94 persen dan Kabupaten Bantul sebesar 12,46 persen. Sedangkan Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul sumbangan PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil (di bawah 10 persen).

Tabel 3
Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rupiah)	Rencana Belanja (Juta Rupiah)	Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)	Persentase PAD thd Rencana Pendapatan	Persentase PAD thd Rencana Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	2.286.855,09	2.454.919,43	1.014.089,54	44,34	41,31
Kab. Kulonprogo	918.782,46	935.369,84	64.750,33	7,05	6,92
Kab. Bantul	1.337.731,87	1.355.174,64	170.006,17	12,71	12,54
Kab. Gunungkidul	1.172.722,55	1.236.639,67	66.710,86	5,69	5,39
Kab. Sleman	1.670.168,67	1.733.223,83	298.406,95	17,87	17,22
Kota Yogyakarta	1.071.527,41	1.154.066,34	304.797,50	28,45	26,41

Upaya peningkatan PAD oleh pemerintah daerah belum tercermin pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, dimana persentase PAD terhadap pendapatan tahun tersebut sebagian besar kabupaten/kota masih di bawah persentase tahun 2012. Hanya Kabupaten Bantul yang menargetkan persentase PAD yang lebih tinggi yaitu dari 12,46 persen di tahun 2012 menjadi 12,71 persen pada tahun 2013.

Dalam lima tahun terakhir upaya peningkatan PAD di masing-masing pemerintah daerah terlihat pada tabel 4. Secara umum terlihat ada peningkatan persentase PAD terhadap pendapatan daerahnya, meskipun tidak begitu besar. Kota Yogyakarta terlihat cukup berhasil meningkatkan PAD nya dari tahun ke tahun. Paling tidak hal ini terlihat dalam lima tahun terakhir dimana PAD Kota Yogyakarta tahun 2012 mencapai 29,26 persen dari pendapatan daerah, padahal tahun 2008 baru mencapai 18,39 persen. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 mengalami penurunan persentase PAD setelah mengalami peningkatan yang signifikan dalam empat tahun sebelumnya. Meskipun demikian persentase PADnya masih cukup tinggi yaitu 46,23 persen dari pendapatan daerahnya.

Tabel 4
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 – 2012

Pemerintah Daerah	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I.Yogyakarta	41,73	50,16	53,86	54,02	46,23
Kab. Kulonprogo	7,27	6,60	7,63	6,79	8,39
Kab. Bantul	6,82	10,05	8,27	10,92	12,46
Kab. Gunungkidul	4,78	5,40	5,33	5,64	6,23
Kab. Sleman	14,86	15,78	14,88	17,29	18,94
Kota Yogyakarta	18,39	21,53	22,00	24,05	29,26

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat). Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, pada dasarnya dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun dalam rangka ekstensifikasi khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah selain dari PAD juga berasal dari Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta Lain-lain Penerimaan yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan bukan pajak. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil bukan pajak bersumber dari sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi). Dasar perolehan dana perimbangan dapat dilihat pada Tabel 5.

Sumber pendapatan lain yang sangat berperan sampai sekarang adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dua puluh enam persen (26 persen) dari penerimaan APBN (penerimaan dari minyak dan gas, penerimaan pajak serta penerimaan dari non-migas dan non-pajak)

dialokasikan untuk DAU. Sepuluh persen (10 persen) DAU dibagi ke provinsi, dan sembilan puluh persen (90 persen) dibagi ke kabupaten/kota.

Tabel 5
Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah menurut
Undang-undang nomor 33 Tahun 2004

Jenis Pungutan	Pemerintah (Persen)	Provinsi Bersangkutan (Persen)	Kabupaten /kota Penghasil (Persen)	Kabupaten /Kota Lain dan Provinsi Bersangkutan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PBB ¹⁾	10,0	16,2	64,8	0,0
2. BPHTB	20,0	16,0	64,0	0,0
3. PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21	80,0	8,0	12,0	0,0
4. Kehutanan				
a. IHPH/IHH	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Provisi Sumber Daya Hutan	20,0	16,0	32,0	32,0
c. Reboisasi	60,0	0,0	40,0	0,0
5. Pertambangan Umum				
a. Land-Rent (Iuran Tetap)	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Royalty iuran Eksplorasi	20,0	16,0	32,0	32,0
6. Perikanan ²⁾	20,0	0,0	0,0	0,0
7. Minyak Bumi	84,5	3,1	6,2	6,2
8. Gas Bumi	69,5	6,1	12,2	12,2
9. Panas Bumi	20,0	16,0	32,0	32,0

Catatan : ¹⁾ 9 % untuk biaya pemungutan

²⁾ 80% untuk seluruh kabupaten/kota

Alokasi DAU tergantung dari bobot (tolok ukur) daerah. Penentuan Tolok Ukur (Bobot) didasarkan pada kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, yang selanjutnya berkembang menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lain. Potensi ekonomi daerah yang antara lain dapat dicerminkan dari potensi penerimaan yang diterima daerah seperti potensi industri, sumber daya alam (SDA),

sumber daya manusia (SDM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi tolok ukur penentuan DAU.

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Pada dasarnya, dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan ketergantungan daerah pada pusat tentang keuangan daerah diharapkan semakin kecil (sumbangan DAU kecil), atau dengan kata lain sumber pendapatan daerah bisa bersumber pada daerah sendiri (sumbangan PAD besar).

Tabel 6
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap
Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja (Juta Rupiah)	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rupiah)	Persentase DAU thd Pendapatan	Persentase DAU thd Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	2.171.734,31	2.053.825,96	757.056,70	34,86	36,86
Kab. Kulonprogo	882.586,66	881.690,25	531.104,02	60,18	60,24
Kab. Bantul	1.337.570,72	1.282.878,38	768.034,58	57,42	59,87
Kab. Gunungkidul	1.076.502,00	1.073.158,31	687.944,49	63,91	64,10
Kab. Sleman	1.589.722,97	1.421.401,17	795.708,77	50,05	55,98
Kota Yogyakarta	1.158.134,80	1.023.949,92	536.466,61	46,32	52,39

Pada tahun 2012 besarnya DAU yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 757,06 milyar rupiah atau mencapai 34,86 persen dari pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Besaran ini mampu mencukupi 36,86 persen dari belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012.

Sampai tahun ke-11 diberlakukannya otonomi daerah, sumbangan DAU bagi pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta masih besar. Antara 46-64 persen pendapatan pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta diperoleh dari DAU, sementara di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013 sektor ini malah meningkat persentasenya, yaitu antara 53-66 persen. Dengan kondisi seperti itu, tentunya pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta sekali lagi masih perlu meningkatkan PAD nya agar ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam hal keuangan bisa diminimalkan demi terselenggaranya otonomi daerah yang nyata.

Tabel 7
Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rupiah)	Rencana Belanja (Juta Rupiah)	Rencana Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rupiah)	Persentase DAU thd Rencana Pendapatan	Persentase DAU thd Rencana Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	2.286.855,09	2.454.919,43	828.334,77	36,22	33,74
Kab. Kulonprogo	918.782,46	935.369,84	594.978,79	64,76	63,61
Kab. Bantul	1.337.731,87	1.355.174,64	854.810,63	63,90	63,08
Kab. Gunungkidul	1.172.722,55	1.236.639,67	779.069,24	66,43	63,00
Kab. Sleman	1.670.168,67	1.733.223,83	891.589,91	53,38	51,44
Kota Yogyakarta	1.071.527,41	1.154.066,34	597.212,21	55,73	51,75

Realisasi DAU dalam lima tahun terakhir peranannya terus menurun terhadap pendapatan daerah. Dari kisaran 57-73 persen pada tahun 2008, menjadi 46-64 persen pada tahun 2012 untuk pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta persentase DAU terhadap pendapatan daerah pada lima tahun terakhir ini cenderung menurun tiap tahunnya.

Tabel 8
Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2008 - 2012

Pemerintah Daerah	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	40,66	40,74	38,38	38,69	34,86
Kab. Kulonprogo	69,36	69,26	64,97	56,08	60,18
Kab. Bantul	56,97	64,45	58,11	52,95	57,42
Kab. Gunungkidul	73,29	71,38	65,30	59,22	63,91
Kab. Sleman	62,61	59,01	51,42	48,19	50,05
Kota Yogyakarta	57,10	55,25	48,49	45,83	46,32

Dalam format lama, belanja daerah dibedakan menjadi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah mulai tahun 2007 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahannya selama tahun 2012 menghabiskan dana 1,24 triliun rupiah (60,33 persen dari total belanja) untuk belanja tidak langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Secara umum persentase pos pembelanjaan daerah pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta tahun 2012 sebagian besar masih digunakan untuk pos Belanja Tidak Langsung.

Tabel 9
Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012

Pemerintah Daerah	Belanja Tidak Langsung (Juta Rupiah)	Persentase terhadap Total Belanja	Belanja Langsung (Juta Rupiah)	Persentase terhadap Total Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	1.239.114,38	60,33	814.711,59	39,67
Kab. Kulonprogo	591.396,65	67,08	290.293,60	32,92
Kab. Bantul	885.971,13	69,06	396.907,26	30,94
Kab. Gunungkidul	761.024,02	70,91	312.134,30	29,09
Kab. Sleman	994.953,51	70,00	426.447,66	30,00
Kota Yogyakarta	609.959,21	59,57	413.990,70	40,43

Pada tahun 2013 terlihat ada rencana penurunan yang signifikan pada persentase belanja tidak langsung pada rencana anggaran tahun 2013 pada semua kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hanya Kabupaten Kulonprogo saja yang persentasenya belum turun dibanding tahun 2012. Bahkan Kota Yogyakarta merencanakan belanja langsungnya lebih besar dibanding belanja tidak langsungnya pada tahun 2013.

Tabel 10
Jumlah dan Persentase Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

Pemerintah Daerah	Rencana Belanja Tidak Langsung (Juta Rupiah)	Persentase terhadap Total Rencana Belanja	Rencana Belanja Langsung (Juta Rupiah)	Persentase terhadap Total Rencana Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	1.427.652,12	58,15	1.027.267,31	41,85
Kab. Kulonprogo	652.352,52	69,74	283.017,31	30,26
Kab. Bantul	920.525,00	67,93	434.649,64	32,07
Kab. Gunungkidul	850.971,80	68,81	385.667,86	31,19
Kab. Sleman	1.144.812,40	66,05	588.411,43	33,95
Kota Yogyakarta	563.575,86	48,83	590.490,48	51,17

Tabel 11
Persentase Belanja Tidak Langsung
terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2007 - 2012

Pemerintah Daerah	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I.Yogyakarta	63,01	52,50	58,21	61,54	60,33
Kab. Kulonprogo	64,03	76,98	77,33	69,20	67,08
Kab. Bantul	57,22	70,25	71,62	70,94	69,06
Kab. Gunungkidul	62,63	72,03	81,10	73,18	70,91
Kab. Sleman	66,08	66,17	69,13	69,11	70,00
Kota Yogyakarta	59,45	60,54	63,75	65,24	59,57

Jika kita cermati persentase belanja tidak langsung dalam lima tahun terakhir, terlihat bahwa belum adanya penurunan pada pos ini, bahkan ada kecenderungan persentasenya terus meningkat dan dominan terhadap belanja daerah. Hal ini terjadi baik di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dilihat dari realisasi belanja menurut jenis belanjanya, Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta paling banyak membelanjakan anggarannya di sektor pendidikan. Hal ini bisa terlihat dari persentase belanja di sektor pendidikan yang paling tinggi dibanding sektor lainnya, bahkan Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul lebih dari separuh belanjanya untuk sektor pendidikan. Sektor berikutnya yang cukup besar persentasenya adalah sektor pelayanan umum dan sektor kesehatan.

Berbeda dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta banyak membelanjakan anggarannya di sektor pelayanan umum, yaitu mencapai 53,63 persen dari total belanja. Sektor lain dengan persentase besar antara lain sektor ekonomi, pendidikan, dan perumahan/fasilitas umum masing-masing sebesar 12,48 persen, 11,88 persen dan 10,69 persen.

Tabel 12
Persentase Realisasi Belanja Menurut Jenisnya
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012

Jenis Belanja	D.I.Yogyakarta	Kabupaten Kulonprogo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	53,63	14,29	16,27	16,45	24,72	21,36
2. Ketertiban dan Keamanan	1,34	0,58	0,95	0,69	1,57	0,27
3. Ekonomi	12,48	8,11	5,00	7,12	8,10	9,42
4. Lingkungan Hidup	0,15	0,56	0,88	0,93	2,48	3,62
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	10,69	12,20	8,55	6,82	15,90	5,86
6. Kesehatan	4,63	12,38	14,18	9,88	22,05	13,32
7. Pariwisata dan Budaya	2,86	0,45	0,65	0,55	1,30	1,77
8. Pendidikan	11,88	50,81	52,81	56,48	20,53	41,96
9. Perlindungan Sosial	2,34	0,63	0,71	1,08	3,35	2,41
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Rencana prioritas belanja pada tahun anggaran 2013 tidak banyak berubah dibanding tahun 2012. Hal ini terlihat dari besarnya persentase masing-masing sektor belanja yang tidak jauh berbeda dibanding realisasi anggaran tahun sebelumnya. Pada rencana anggaran pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, sektor pendidikan, pelayanan umum dan kesehatan masih mendapatkan porsi belanja yang lebih besar dibanding sektor lainnya. Sedangkan pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta porsi belanja yang lebih besar masih pada sektor pelayanan umum, ekonomi dan pendidikan

Tabel 13
Persentase Rencana Belanja Menurut Jenisnya
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

Jenis Belanja	D.I.Yogyakarta	Kabupaten Kulonprogo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	59,23	16,54	19,31	17,42	26,46	27,14
2. Ketertiban dan Keamanan	1,25	0,63	1,24	0,98	1,71	0,04
3. Ekonomi	10,78	7,57	5,47	7,84	10,13	5,64
4. Lingkungan Hidup	0,75	0,32	1,44	1,23	2,26	4,31
6. Perumahan dan Fasilitas Umum	9,02	11,83	8,60	5,47	24,21	9,52
6. Kesehatan	6,89	12,61	13,93	9,93	19,18	14,79
7. Pariwisata dan Budaya	2,30	0,46	0,82	0,69	0,94	0,99
8. Pendidikan	8,04	49,33	47,71	55,11	13,50	35,64
9. Perlindungan Sosial	1,74	0,72	1,46	1,32	1,62	1,93
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Tabel/Table 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2012-2013 / Realization of Daerah Istimewa
Yogyakarta Government's Receipts and Expenditures, 2012-2013
(000 Rp)**

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	2.171.734.308	2.286.855.094
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	1.004.063.126	1.014.089.544
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	894.544.325	961.190.992
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	273.126.857	311.574.558
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	2.053.825.959	2.454.919.428
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	1.239.114.375	1.427.652.116
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	814.711.584	1.027.267.312
	Surplus / (Defisit)	117.908.349	(168.064.334)
	Pembiayaan Netto / Cost	261.333.593	168.064.334

*) Data APBD

Tabel/Table 1.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2013 / Realization of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Receipts, in 2012-2013
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	1.004.063.126	1.014.089.544
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	871.630.605	885.217.610
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	34.115.158	41.436.704
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	35.492.533	36.328.244
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	62.824.830	51.106.986
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	894.544.325	961.190.992
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	118.434.889	98.360.324
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	757.056.696	828.334.768
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	19.052.740	34.495.900
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	273.126.857	311.574.558
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	2.171.734.308	2.286.855.094

*) Data APBD

Tabel/Table 1.3 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2013 / Realization of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Expenditures, in 2012-2013 (000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	1.239.114.375	1.427.652.116
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	455.794.240	503.342.635
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	0	0
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	369.002.245	467.336.914
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	24.153.330	15.955.857
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa/ Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	314.308.555	306.120.014
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	74.683.445	124.470.680
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	1.172.560	10.426.016
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	814.711.584	1.027.267.312
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	116.229.478	125.019.270
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	482.062.124	609.742.632
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	216.419.982	292.505.410
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	2.053.825.959	2.454.919.428

*) Data APBD

Tabel/Table 1.4 **Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2013 / Percentage of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / <i>Local Original Receipts</i>	46,23	44,34
1.2	Dana Perimbangan / <i>Balancing Funds</i>	41,19	42,03
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / <i>Other Receipts</i>	12,58	13,62
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / <i>Indirect Expenditures</i>	60,33	58,15
2.2	Belanja Langsung / <i>Direct Expenditures</i>	39,67	41,85

*) Data APBD

Tabel/Table 1.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2013 / Percentage of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Receipts, in 2012-2013 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	46,23	44,34
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	40,14	38,71
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	1,57	1,81
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	1,63	1,59
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	2,89	2,23
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	41,19	42,03
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	5,45	4,30
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	34,86	36,22
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	0,88	1,51
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	12,58	13,62
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 1.6 Persentase Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2013 / Percentage of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	60,33	58,15
1.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	22,19	20,50
1.2	Belanja Bunga / <i>Profit Expenditures</i>	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi / <i>Subsidies Expenditures</i>	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah / <i>Grant Expenditures</i>	17,97	19,04
1.5	Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Expenditures</i>	1,18	0,65
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	15,30	12,47
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	3,64	5,07
1.8	Belanja Tidak Terduga / <i>Unexpected Expenditures</i>	0,06	0,42
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	39,67	41,85
2.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	5,66	5,09
2.2	Belanja Barang dan Jasa / <i>Goods and Services Expenditures</i>	23,47	24,84
2.3	Belanja Modal / <i>Capital Expenditures</i>	10,54	11,92
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2013 / Realization of Kulonprogo Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	882.586.663	918.782.460
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	74.028.663	64.750.332
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	612.419.550	675.803.314
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	196.138.450	178.228.814
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	881.690.249	935.369.836
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	591.396.647	652.352.523
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	290.293.603	283.017.313
	Surplus / (Defisit)	896.413	(16.587.376)
	Pembiayaan Netto / Cost	66.478.344	16.587.376

*) Data APBD

Tabel/Table 2.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2013 / Realization of Kulonprogo Regency Government's Receipts, in 2012-2013
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	74.028.663	64.750.332
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	8.448.290	7.625.375
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	11.655.375	12.195.609
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	6.765.041	7.562.640
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	47.159.958	37.366.708
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	612.419.550	675.803.314
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	35.936.014	27.930.384
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	531.104.016	594.978.790
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	45.379.520	52.894.140
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	196.138.450	178.228.814
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	882.586.663	918.782.460

*) Data APBD

Tabel/Table 2.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2013 / Realization of Kulonprogo Regency Government's Expenditures, in 2012-2013
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	591.396.647	652.352.523
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	552.597.233	586.379.356
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	40.924	35.406
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	5.807.871	10.822.540
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	2.466.527	14.164.230
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	2.211.122	1.148.469
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government.	26.903.227	32.280.095
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	1.369.743	7.522.427
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	290.293.603	283.017.313
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	41.258.966	47.624.382
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	101.204.056	116.995.995
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	147.830.580	118.396.936
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	881.690.249	935.369.836

*) Data APBD

Tabel/Table 2.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2013 / Percentage of Kulonprogo Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	8,39	7,05
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	69,39	73,55
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	22,22	19,40
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	67,08	69,74
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	32,92	30,26

*) Data APBD

Tabel/Table 2.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2013 / Percentage of Kulonprogo Regency Government's Receipts, in 2012-2013 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	8,39	7,05
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	0,96	0,83
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	1,32	1,33
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0,77	0,82
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	5,34	4,07
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	69,39	73,55
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	4,07	3,04
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	60,18	64,76
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	5,14	5,76
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	22,22	19,40
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 2.6 Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2013 / Percentage of Kulonprogo Regency Government's Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	67,08	69,74
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	62,67	62,69
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	0,66	1,16
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	0,28	1,51
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0,25	0,12
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government.	3,05	3,45
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	0,16	0,80
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	32,92	30,26
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	4,68	5,09
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	11,48	12,51
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	16,77	12,66
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 / Realization of Bantul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	1.337.570.725	1.337.731.871
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	166.597.778	170.006.171
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	885.352.411	923.582.867
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	285.620.536	244.142.833
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	1.282.878.383	1.355.174.640
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	885.971.127	920.524.996
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	396.907.256	434.649.644
	Surplus / (Defisit)	54.692.342	(17.442.769)
	Pembiayaan Netto / Cost	49.415.332	17.442.769

*) Data APBD

Tabel/Table 3.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 / Realization of Bantul Regency Government's Receipts, in 2012-2013

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	166.597.778	170.006.171
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	51.768.352	59.042.000
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	20.595.099	24.586.237
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	8.184.263	9.015.869
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	86.050.064	77.362.065
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	885.352.411	923.582.867
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	54.036.377	21.575.353
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	768.034.584	854.810.634
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	63.281.450	47.196.880
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	285.620.536	244.142.833
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	1.337.570.725	1.337.731.871

*) Data APBD

**Tabel/Table 3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 /
Realization of Bantul Regency Government's Expenditures,
in 2012-2013**

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	885.971.127	920.524.996
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	818.671.802	816.967.660
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	37.873	51.507
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	14.952.495	28.468.250
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	6.895.326	24.651.500
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	1.949.183	1.949.183
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government.	43.254.230	39.335.571
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	210.218	9.101.325
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	396.907.256	434.649.644
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	75.488.327	84.866.329
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	181.312.176	202.986.346
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	140.106.753	146.796.969
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	1.282.878.383	1.355.174.640

*) Data APBD

Tabel/Table 3.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 / Percentage of Bantul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	12,46	12,71
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	66,19	69,04
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	21,35	18,25
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	69,06	67,93
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	30,94	32,07

*) Data APBD

Tabel/Table 3.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 / Percentage of Bantul Regency Government's Receipts, in 2012-2013

(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	12,46	12,71
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	3,87	4,41
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	1,54	1,84
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0,61	0,67
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	6,43	5,78
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	66,19	69,04
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	4,04	1,61
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	57,42	63,90
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	4,73	3,53
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	21,35	18,25
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 3.6 Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013 / Percentage of Bantul Regency Government's Expenditures, in 2012-2013

(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	69,06	67,93
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	63,82	60,29
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	1,17	2,10
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	0,54	1,82
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0,15	0,14
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	3,37	2,90
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	0,02	0,67
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	30,94	32,07
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	5,88	6,26
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	14,13	14,98
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	10,92	10,83
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2013 / Realization of Gunungkidul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	1.076.501.995	1.172.722.552
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	67.050.782	66.710.860
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	799.932.049	879.073.986
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	209.519.165	226.937.706
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	1.073.158.313	1.236.639.665
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	761.024.018	850.971.804
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	312.134.295	385.667.861
	Surplus / (Defisit)	3.343.682	(63.917.113)
	Pembiayaan Netto / Cost	107.426.615	63.917.114

*) Data APBD

Tabel/Table 4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2013 / Realization of Gunungkidul Regency Government's Receipts, in 2012-2013
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	67.050.782	66.710.860
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	10.728.490	9.949.000
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	19.667.336	22.286.629
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	5.329.404	5.427.612
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	31.325.551	29.047.619
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	799.932.049	879.073.986
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	41.403.140	34.721.138
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	687.944.489	779.069.238
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	70.584.420	65.283.610
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	209.519.165	226.937.706
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	1.076.501.995	1.172.722.552

*) Data APBD

Tabel/Table 4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2013 / Realization of Gunungkidul Regency Government's Expenditures, in 2012-2013
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	761.024.018	850.971.804
1.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	699.921.656	761.253.894
1.2	Belanja Bunga / <i>Profit Expenditures</i>	35.197	26.850
1.3	Belanja Subsidi / <i>Subsidies Expenditures</i>	0	0
1.4	Belanja Hibah / <i>Grant Expenditures</i>	6.031.450	11.234.176
1.5	Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Expenditures</i>	5.718.671	23.489.878
1.6	Belanja bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government.</i>	3.797.317	3.252.566
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	45.321.431	49.714.440
1.8	Belanja Tidak Terduga / <i>Unexpected Expenditures</i>	198.297	2.000.000
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	312.134.295	385.667.861
2.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	34.472.698	46.640.794
2.2	Belanja Barang dan Jasa / <i>Goods and Services Expenditures</i>	113.300.657	159.684.982
2.3	Belanja Modal / <i>Capital Expenditures</i>	164.360.941	179.342.085
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	1.073.158.313	1.236.639.665

*) Data APBD

**Tabel/Table 4.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2012-2013 / Percentage of Gunungkidul Regency
Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013
(Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	6,23	5,69
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	74,31	74,96
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	19,46	19,35
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	70,91	68,81
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	29,09	31,19

*) Data APBD

Tabel/Table 4.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2013 / Percentage of Gunungkidul Regency Government's Receipts, in 2012-2013 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	6,23	5,69
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	1,00	0,85
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	1,83	1,90
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0,50	0,46
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	2,91	2,48
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	74,31	74,96
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	3,85	2,96
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	63,91	66,43
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	6,56	5,57
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	19,46	19,35
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 4.6 Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2013 / Percentage of Gunungkidul Regency Government's Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	70,91	68,81
1.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	65,22	61,56
1.2	Belanja Bunga / <i>Profit Expenditures</i>	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi / <i>Subsidies Expenditures</i>	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah / <i>Grant Expenditures</i>	0,56	0,91
1.5	Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Expenditures</i>	0,53	1,90
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	0,35	0,26
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	4,22	4,02
1.8	Belanja Tidak Terduga / <i>Unexpected Expenditures</i>	0,02	0,16
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	29,09	31,19
2.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	3,21	3,77
2.2	Belanja Barang dan Jasa / <i>Goods and Services Expenditures</i>	10,56	12,91
2.3	Belanja Modal / <i>Capital Expenditures</i>	15,32	14,50
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 5.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2013 / Realization of Sleman Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	1.589.722.974	1.670.168.665
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	301.069.539	298.406.947
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	946.821.049	992.216.461
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	341.832.386	379.545.257
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	1.421.401.171	1.733.223.826
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	994.953.506	1.144.812.399
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	426.447.665	588.411.427
	Surplus / (Defisit)	168.321.804	(63.055.161)
	Pembiayaan Netto / Cost	120.758.071	63.055.161

*) Data APBD

Tabel/Table 5.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2013 / Realization of Sleman Regency Government's Receipts, in 2012-2013
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	301.069.539	298.406.947
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	177.835.870	190.350.000
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	34.034.970	30.437.957
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	12.783.122	13.855.000
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	76.415.577	63.763.990
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	946.821.049	992.216.461
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	98.874.892	49.803.219
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	795.708.767	891.589.912
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	52.237.390	50.823.330
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	341.832.386	379.545.257
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	1.589.722.974	1.670.168.665

*) Data APBD

Tabel/Table 5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2013 / Realization of Sleman Regency Government's Expenditures, in 2012-2013

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	994.953.506	1.144.812.399
1.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	888.587.100	992.715.699
1.2	Belanja Bunga / <i>Profit Expenditures</i>	45.273	144.000
1.3	Belanja Subsidi / <i>Subsidies Expenditures</i>	0	15.807.638
1.4	Belanja Hibah / <i>Grant Expenditures</i>	45.170.865	28.113.486
1.5	Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Expenditures</i>	13.974.610	27.941.573
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	23.824.947	33.879.053
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	22.157.039	34.291.400
1.8	Belanja Tidak Terduga / <i>Unexpected Expenditures</i>	1.193.673	11.919.550
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	426.447.665	588.411.427
2.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	90.666.521	122.974.353
2.2	Belanja Barang dan Jasa / <i>Goods and Services Expenditures</i>	203.244.891	263.764.884
2.3	Belanja Modal / <i>Capital Expenditures</i>	132.536.252	201.672.190
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	1.421.401.171	1.733.223.826

*) Data APBD

Tabel/Table 5.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2013 / Percentage of Sleman Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	18,94	17,87
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	59,56	59,41
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	21,50	22,72
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	70,00	66,05
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	30,00	33,95

*) Data APBD

Tabel/Table 5.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2013 / Percentage of Sleman Regency Government's Receipts, in 2012-2013
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	18,94	17,87
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	11,19	11,40
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	2,14	1,82
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0,80	0,83
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	4,81	3,82
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	59,56	59,41
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	6,22	2,98
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	50,05	53,38
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	3,29	3,04
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	21,50	22,72
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 5.6 Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2013 / Percentage of Sleman Regency Government's Expenditures, in 2012-2013
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	70,00	66,05
1.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	62,51	57,28
1.2	Belanja Bunga / <i>Profit Expenditures</i>	0,00	0,01
1.3	Belanja Subsidi / <i>Subsidies Expenditures</i>	0,00	0,91
1.4	Belanja Hibah / <i>Grant Expenditures</i>	3,18	1,62
1.5	Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Expenditures</i>	0,98	1,61
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	1,68	1,95
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	1,56	1,98
1.8	Belanja Tidak Terduga / <i>Unexpected Expenditures</i>	0,08	0,69
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	30,00	33,95
2.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	6,38	7,10
2.2	Belanja Barang dan Jasa / <i>Goods and Services Expenditures</i>	14,30	15,22
2.3	Belanja Modal / <i>Capital Expenditures</i>	9,32	11,64
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 6.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013 / Realization of Yogyakarta City Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	1.158.134.797	1.071.527.411
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	338.839.606	304.797.499
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	602.310.072	656.301.045
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	216.985.119	110.428.867
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	1.023.949.917	1.154.066.336
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	609.959.214	563.575.857
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	413.990.703	590.490.479
	Surplus / (Defisit)	134.184.880	(82.538.925)
	Pembiayaan Netto / Cost	90.120.676	63.437.368

*) Data APBD

Tabel/Table 6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013 / Realization of Yogyakarta City Government's Receipts, in 2012-2013

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	338.839.606	304.797.499
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	208.329.209	192.838.244
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	38.770.585	32.931.371
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	11.496.627	11.546.396
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	80.243.185	67.481.488
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	602.310.072	656.301.045
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	59.358.108	52.868.206
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	536.466.614	597.212.209
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	6.485.350	6.220.630
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	216.985.119	110.428.867
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	1.158.134.797	1.071.527.411

*) Data APBD

**Tabel/Table 6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013 /
Realization of Yogyakarta City Government's Expenditures, in
2012-2013**

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	609.959.214	563.575.857
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	566.336.888	509.835.255
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	118.866	75.486
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	39.429.732	43.928.330
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	1.510.000	5.277.000
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0	0
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	2.306.652	2.459.786
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	257.076	2.000.000
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	413.990.703	590.490.479
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	102.410.276	127.905.802
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	223.244.536	341.027.564
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	88.335.891	121.557.113
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	1.023.949.917	1.154.066.336

*) Data APBD

Tabel/Table 6.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013 / Percentage of Yogyakarta City Government's Receipts and Expenditures, in 2012-2013 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	29,26	28,45
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	52,01	61,25
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	18,74	10,31
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	59,57	48,83
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	40,43	51,17

*) Data APBD

Tabel/Table 6.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013 / Percentage of Yogyakarta City Government's Receipts, in 2012-2013

(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	29,26	28,45
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	17,99	18,00
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	3,35	3,07
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0,99	1,08
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	6,93	6,30
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	52,01	61,25
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	5,13	4,93
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	46,32	55,73
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	0,56	0,58
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	18,74	10,31
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 6.6 Persentase Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013 / Percentage of Yogyakarta City Government's Expenditures, in 2012-2013
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	59,57	48,83
1.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	55,31	44,18
1.2	Belanja Bunga / <i>Profit Expenditures</i>	0,01	0,01
1.3	Belanja Subsidi / <i>Subsidies Expenditures</i>	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah / <i>Grant Expenditures</i>	3,85	3,81
1.5	Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Expenditures</i>	0,15	0,46
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	0,00	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / <i>Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	0,23	0,21
1.8	Belanja Tidak Terduga / <i>Unexpected Expenditures</i>	0,03	0,17
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	40,43	51,17
2.1	Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	10,00	11,08
2.2	Belanja Barang dan Jasa / <i>Goods and Services Expenditures</i>	21,80	29,55
2.3	Belanja Modal / <i>Capital Expenditures</i>	8,63	10,53
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183
Telp.: (0274)4342234, fax.:(0274)4342230
Homepage:<http://yogyakarta.bps.go.id>, *e-mail:*bps3400@bps.go.id